

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pertama kali dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1978 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur; pada Tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pendapatan dan Aset Daerah digabung dengan Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pendapatan dan Aset Daerah dipisah dengan Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 1 Kantor Pusat, berkedudukan di Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jalan El Tari, Kota Kupang dan 22 UPTD Pendapatan Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota Se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas “Membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah”. Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendapatan dan aset daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendapatan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan dan aset daerah
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT terdiri dari:

1. Kepala Badan

Bertanggung jawab untuk mengembangkan program kerja untuk Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang mencakup Kesekretariatan, Bidang Pendapatan I, Bidang Pendapatan II, Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan

Pengamanan Aset sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk membantu urusan keuangan terkait pendapatan dan aset daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Sekretariat, dipimpin Sekretaris yang membawahi 2 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Merencanakan dan mengawasi kegiatan operasional program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian, dan umum, serta membantu kepala badan mengkoordinasikan bidang-bidang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan layanan administratif yang cepat, tepat, dan lancar.

3. Bidang Pendapatan I, terdiri atas: Sub Bidang Pendataan dan Penetapan, Sub Bagian Pembukuan dan Penagihan

Bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi yang mendukung urusan pemerintahan di bidang keuangan, termasuk aspek pendapatan, pengelolaan dan fasilitasi pendapatan I, termasuk pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan, serta layanan dan keberatan.

4. Bidang Pendapatan II, terdiri atas: Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I, Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II

Bertanggung jawab untuk mengelola fungsi yang mendukung urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya aspek pendapatan (pendapatan II), yang mencakup pendataan dan penerimaan I, pendataan dan penerimaan II, dan pendataan dan penerimaan III.

5. Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, terdiri atas: Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan, Sub Bidang Penatausahaan Aset

Bertugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan dan penatausahaan aset meliputi analisa kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan serta penetapan status dan penilaian aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan.

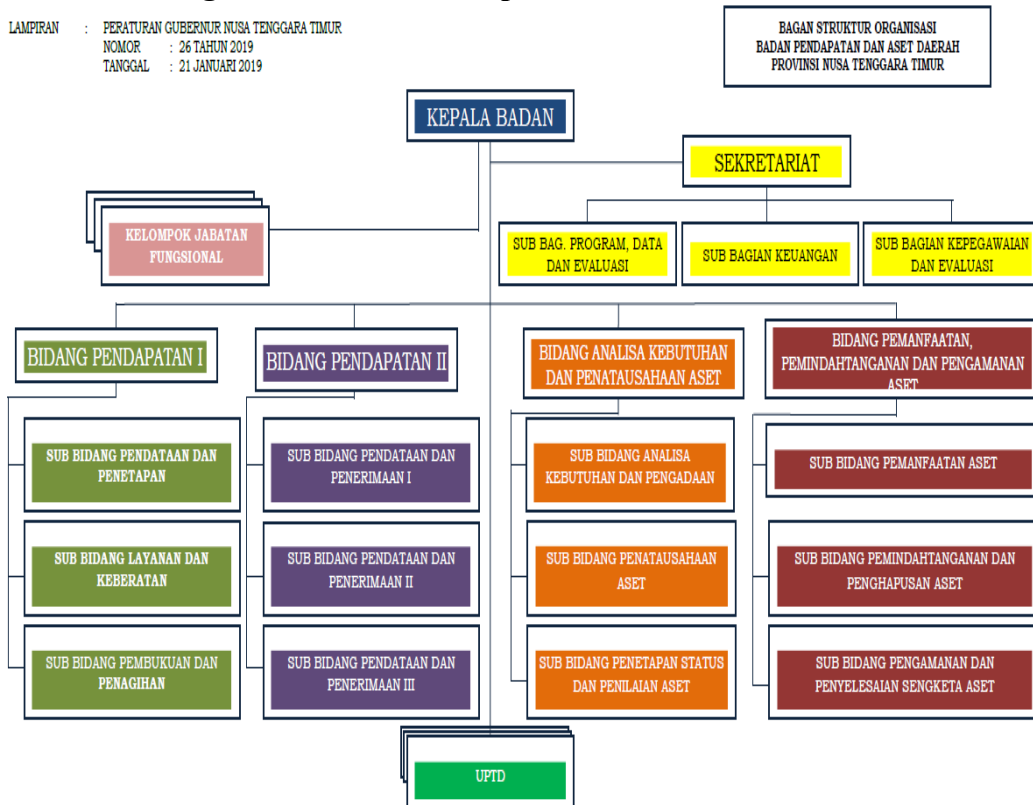
6. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, terdiri atas:  
Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset, Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset.

Bertanggung jawab untuk merencanakan dan menilai prosedur operasional, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah, termasuk pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengaman aset sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan operasi penyelenggaraan pemerintahan

Berikut adalah gambar struktur organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 26 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 21 JANUARI 2019



Sumber: Peraturan Gubernur NTT No. 26 Tahun 2019

#### 4.1.2. Karakteristik Responden

##### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data responden pengurus aset tiap perangkat perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pegawai Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	49	68%
2	Perempuan	23	32%
<b>Total Responden</b>		<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari total responden sebanyak 72 orang, jumlah responden terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 49 orang (68%) dan responden perempuan sebanyak 23 orang (32%). Jumlah pegawai laki-laki lebih banyak karena, pengurusan aset cenderung diberikan kepada pegawai laki-laki. Menurut peneliti, pada dasarnya, pengurusan aset tidak perlu membedakan jenis kelamin pengurusnya karena hal yang terpenting adalah bagaimana seseorang melakukan tugas dan tanggungjawabnya.

## 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Data pada tabel dibawah ini adalah responden berdasarkan usia:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	%
1	18-30 Tahun	4	6%
2	31-40 Tahun	14	19%
3	41-50 Tahun	40	56%
4	51-58 Tahun	14	19%
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer, diolah 2019*

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak adalah yang berusia 41-50 Tahun dengan jumlah 40 orang dan jumlah responden terendah ada pada usia 18-30 Tahun, yaitu sebanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini telah memiliki penguasaan mengenai tugas pokok dan fungsi pegawai, baik itu manajerial maupun teknis.

## 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pada Tabel 4.3 menunjukkan data responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	SMA	18	25%
2	Diploma	6	8%
3	Sarjana	38	53%
4	Pascasarjana	10	14%
<b>Total Responden</b>		<b>72</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer, diolah 2023*

Mayoritas pendidikan terakhir responden adalah Sarjana dengan jumlah 38 orang dan yang paling sedikit adalah responden dengan pendidikan terakhir Diploma berjumlah 6 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target pengembangan pegawai dapat dilakukan pada tingkat pendidikan SMA dan diploma menjadi sarjana serta yang pendidikan terakhir sarjana agar diberikan kesempatan mengembangkan tingkat pendidikan ke yang lebih tinggi.

#### 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Pada Tabel 4.4 menunjukkan data responden berdasarkan masa kerja di pengelolaan aset:

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja**

No	Masa Kerja	Jumlah	%
1	1 - 10 Tahun	14	19%
2	11 - 20 Tahun	25	35%
3	21- 30 Tahun	24	33%
4	31 Tahun ke atas	9	13%
<b>Total Responden</b>		<b>72</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer, diolah 2023*

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, diperoleh gambaran bahwa mayoritas responden telah memiliki masa kerja selama 11-20 Tahun dalam hal

pengelolaan aset tetap. Dengan demikian, responden penelitian ini telah memiliki masa kerja yang cukup baik sehingga cukup mengetahui mengenai pengelolaan aset tetap.

#### 4.2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas dan reliabilitas harus dilakukan sebelum instrumen penelitian dapat digunakan. Uji reliabilitas menentukan apakah instrumen penelitian dapat digunakan berulang kali pada waktu yang berbeda. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap jawaban dari 30 responden uji coba.

##### 1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan, uji validitas variabel penelitian adalah sebagai berikut

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Koefisien Korelasi				Ket
	Pengelolaan Aset Tetap	Kepatuhan pada Regulasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Komitmen Pimpinan	
1	0.440	0.797	0.863	0.763	Valid
2	0.491	0.730	0.773	0.795	Valid
3	0.497	0.841	0.772	0.651	Valid
4	0.620	0.743	0.788	0.673	Valid
5	0.567	0.523	0.738	0.544	Valid
6	0.545	0.848	0.692	0.423	Valid
7	0.511				Valid
8	0.602				Valid
9	0.417				Valid
10	0.659				Valid

*Sumber : Hasil Analisis Data Primer, Lampiran 2*



Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan untuk variabel kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen pimpinan dan pengelolaan aset tetap mempunyai nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Hasil uji Reliabilitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Jumlah Item	Ket
Pengelolaan aset tetap	0.722	10	Reliabel
Kepatuhan pada regulasi	0.841	6	Reliabel
Pemanfaatan teknologi informasi	0.858	6	Reliabel
Komitmen pimpinan	0.708	6	Reliabel

*Sumber: Hasil Analisis Data Primer, Lampiran 3*

Sebagian besar pernyataan memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,6 yang dipersyaratkan, yang menunjukkan bahwa semua pernyataan adalah reliabel dan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh data dari tabel uji reliabilitas.

## 4.3. Analisis Statistik

### 4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang gambaran variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam

pengujian hipotesis statistik. Menurut Sujarweni (2015: 29) statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek penelitian melalui data sampel atau populasi.

### 1. Variabel Pengelolaan Aset Tetap

Adapun jawaban responden terhadap variabel pengelolaan aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Deskripsi Variabel Pengelolaan Aset Tetap**

No	Indikator	Item Pernyataan	$\Sigma$	$\bar{X}Ps - p$	$(\bar{X}Ps - p)/5$	Ps - p	Skor Indikator	Kategori
1	Perencanaan	1	242	3.36	0.67	67.22	68.06	Baik
		2	248	3.44	0.69	68.89		
2	Pengadaan	3	250	3.47	0.69	69.44	68.75	Baik
		4	245	3.40	0.68	68.06		
3	Penggunaan/ pemanfaatan	5	249	3.46	0.69	69.17	69.31	Baik
		6	250	3.47	0.69	69.44		
4	Pengamanan/ pemeliharaan	7	232	3.22	0.64	64.44	65.97	Cukup Baik
		8	243	3.38	0.68	67.50		
5	Penghapusan/ pemindahtanganan	9	237	3.29	0.66	65.83	65.56	Cukup Baik
		10	235	3.26	0.65	65.28		
<b>Rata-rata</b>							<b>67.53</b>	<b>Cukup Baik</b>

Sumber : Hasil Analisis Data Primer, Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa tanggapan responden mengenai pengelolaan aset tetap sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 67,53 (Cukup Baik). Dari 5 indikator yang diteliti, 3 indikator memperoleh capaian baik dan 2 indikator memperoleh capaian cukup baik. Indikator penggunaan/pemanfaatan memperoleh capaian tertinggi yaitu 69,31, sedangkan indikator dengan capaian terendah adalah penghapusan/pemindahhtugasan sebesar 65,28.

### 2. Variabel Kepatuhan Pada Regulasi

Adapun jawaban responden terhadap variabel kepatuhan pada regulasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Deskripsi Variabel Kepatuhan Pada Regulasi**

No	Indikator	Item Pernyataan	$\Sigma$	$\bar{X}Ps - p$	$(\bar{X}Ps - p)/5$	Ps - p	Skor Indikator	Kategori
1	Penerimaan akan regulasi	1	256	3.56	0.71	71.11	70.83	Baik
		2	254	3.53	0.71	70.56		
2	Kepatuhan pada standar kerja	3	261	3.63	0.73	72.50	71.81	Baik
		4	256	3.56	0.71	71.11		
3	Kepatuhan administrasi	5	259	3.60	0.72	71.94	71.67	Baik
		6	257	3.57	0.71	71.39		
<b>Rata-rata</b>							<b>71.44</b>	<b>Baik</b>

*Sumber : Hasil Analisis Data Primer, Lampiran 4*

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa tanggapan responden mengenai kepatuhan pada regulasi sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 71,44. (Baik). Dari 3 indikator yang diteliti, seluruh indikator memperoleh capaian baik. Indikator kepatuhan pada standar kerja memperoleh capaian tertinggi yaitu 71,81, sedangkan indikator dengan capaian terendah adalah Penerimaan akan regulasi sebesar 70,83.

### 3. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Adapun jawaban responden terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi**

No	Indikator	Item Pernyataan	$\Sigma$	$\bar{X}Ps - p$	$(\bar{X}Ps - p)/5$	Ps - p	Skor Indikator	Kategori
1	Perangkat Keras Komputer ( <i>Hardware</i> )	1	232	3.22	0.64	64.44	64.72	Cukup Baik
		2	234	3.25	0.65	65.00		
2	Perangkat Lunak Komputer ( <i>Software</i> )	3	229	3.18	0.64	63.61	63.75	Cukup Baik
		4	230	3.19	0.64	63.89		
3	Jaringan dan Komunikasi	5	226	3.14	0.63	62.78	64.31	Cukup Baik
		6	237	3.29	0.66	65.83		
<b>Rata-rata</b>							<b>64.26</b>	<b>Cukup Baik</b>

*Sumber : Hasil Analisis Data Primer, Lampiran 4*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 64,26 (Cukup Baik). Dari 3 indikator yang diteliti, seluruhnya memperoleh capaian cukup baik. Indikator Perangkat Keras Komputer (*Hardware*) memperoleh capaian tertinggi yaitu 64,72 sedangkan indikator capaian terendah adalah Perangkat Lunak Komputer (*Software*) sebesar 63,75.

#### 4. Variabel Komitmen Pimpinan

Adapun jawaban responden terhadap variabel komitmen pimpinan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.10**  
**Deskripsi Variabel Komitmen Pimpinan**

No	Indikator	Item Pernyataan	$\Sigma$	$\bar{X}Ps - p$	$(\bar{X}Ps - p)/5$	Ps - p	Skor Indikator	Kategori
1	Sikap pimpinan	1	248	3.44	0.69	68.89	68.61	Baik
		2	246	3.42	0.68	68.33		
2	Peran pimpinan	3	242	3.36	0.67	67.22	67.22	Cukup Baik
		4	242	3.36	0.67	67.22		
3	Tanggungjawab	5	246	3.42	0.68	68.33	68.75	Baik
		6	249	3.46	0.69	69.17		
<b>Rata-rata</b>							<b>68.19</b>	<b>Baik</b>

Sumber : Hasil Analisis Data Primer, Lampiran 4

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai komitmen pimpinan sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 68,19 (Baik). Dari 3 indikator yang diteliti, 2 indikator memperoleh capaian baik dan 1 indikator memperoleh capaian cukup baik. Indikator tanggungjawab memperoleh capaian tertinggi yaitu 68,75, sedangkan indikator dengan capaian terendah adalah peran pimpinan sebesar 67,22.

### 4.3.2. Analisis Statistik Inferensial

#### 4.3.2.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.11**  
**Analisis Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	4.258	4.050	
Kepatuhan pada regulasi	.840	.106	.656
2 Pemanfaatan teknologi informasi	.300	.147	.129
Komitmen pimpinan	.385	.136	.233

*Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 6*

Hasil analisis data pada Tabel 4.11 di atas, dapat dibuatkan model persamaan Regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,258 + 0,106X_1 + 0,147 X_2 + 0,136 X_3$$

Nilai konstanta (a) adalah menunjukkan besarnya nilai pengelolaan aset tetap (Y) dinyatakan konstan dengan nilai sebesar 4,258. Hal ini berarti bahwa adanya pengaruh yang searah antara variabel kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap. Artinya jika semua variabel independen bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai pengelolaan aset tetap adalah 4,258. Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koefisien Regresi  $X_1$  ( $\beta_1$ ) : 0,656

Nilai koefisien regresi variabel kepatuhan pada regulasi adalah 0,656. Nilai ini paling tinggi di antara nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan. Nilai ini mengartikan bahwa kepatuhan pada regulasi memiliki pengaruh paling besar terhadap pengelolaan aset tetap. Nilai yang diperoleh ini adalah nilai positif, dimana disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dari kepatuhan pada regulasi terhadap pengelolaan aset tetap. Sehingga jika kepatuhan pada regulasi semakin baik, maka pengelolaan aset tetap juga akan semakin baik.

2. Koefisien Regresi  $X_2$  ( $\beta_2$ ): 0,129

Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,129. Nilai ini paling rendah di antara nilai koefisien regresi variabel kepatuhan pada regulasi dan komitmen pimpinan. Nilai ini mengartikan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh paling kecil terhadap pengelolaan aset tetap. Nilai yang diperoleh ini adalah nilai positif, dimana disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan aset tetap. Sehingga jika pemanfaatan teknologi informasi semakin baik, maka pengelolaan aset tetap juga akan semakin baik.

3. Koefisien Regresi  $X_3$  ( $\beta_3$ ) : 0,233

Nilai koefisien regresi variabel komitmen pimpinan adalah 0,233. Nilai ini lebih kecil dari nilai koefisien regresi variabel kepatuhan pada regulasi dan lebih besar dari nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi. Nilai ini mengartikan bahwa komitmen pimpinan memiliki

pengaruh yang sedang terhadap pengelolaan aset tetap. Nilai yang diperoleh ini adalah nilai positif, dimana disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dari komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap. Sehingga jika komitmen pimpinan semakin baik, maka pengelolaan aset tetap juga akan semakin baik.

#### 4.3.2.2. Pengujian Hipotesis

##### 1. Uji Hipotesis secara parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial dari variabel motivasi kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap variabel kinerja. Berikut adalah hasil analisis uji hipotesis uji t dengan menggunakan program SPSS, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.12:

**Tabel 4.12**  
**Uji Hipotesis Parsial (Uji t)**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.258	4.050		1.052	.297
	Kepatuhan pada regulasi	.840	.106	.656	7.893	.000
	Pemanfaatan teknologi informasi	.300	.147	.129	2.034	.046
	Komitmen pimpinan	.385	.136	.233	2.827	.006

Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 6

Penjelasan dari hasil pada Tabel 4.12 adalah sebagai berikut:

a. Variabel kepatuhan pada regulasi ( $X_1$ ) :

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 7.893 (lebih besar dari nilai t tabel 1,66757) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Maka keputusannya adalah

secara parsial variabel kepatuhan pada regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengelolaan aset tetap. Artinya, dengan meningkatkan kepatuhan pada regulasi, maka dapat meningkatkan pengelolaan aset tetap.

b. Variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) :

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.034 (lebih besar dari nilai t tabel 1,66757) dengan nilai signifikansi sebesar 0,046. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Maka keputusannya adalah secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengelolaan aset tetap. Artinya, dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, maka dapat meningkatkan pengelolaan aset tetap.

c. Variabel komitmen pimpinan ( $X_3$ ) :

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.827 (lebih besar dari nilai t tabel 1,66757) dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Maka keputusannya adalah secara parsial variabel komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengelolaan aset tetap. Artinya, dengan meningkatkan komitmen pimpinan, maka dapat meningkatkan pengelolaan aset tetap.

## **2. Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)**

Hasil analisis uji hipotesis uji F dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:



**Tabel 4.13**  
**Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1511.905	3	503.968	61.485	.000 <sup>b</sup>
	Residual	557.373	68	8.197		
	Total	2069.278	71			

*Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 6*

Hasil uji statistik berdasarkan perhitungan Anova menunjukkan nilai F sebesar 61,485 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan atau bersama-sama, variabel kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap.

#### 4.3.2.3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil R<sup>2</sup> yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.14**  
**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.855 <sup>a</sup>	.731	.719	2.863

*Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 6*

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4.14 di atas, terlihat bahwa nilai Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,731. Hal ini diartikan bahwa kontribusi variabel kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap sebesar 73,1 %, sedangkan sisanya 26,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset, kualitas aparatur daerah, dan lain-lain.

#### 4.3.2.4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik.

##### 1. Uji Normalitas

Hasil analisis uji normalitas untuk melihat normal tidaknya data dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.15 berikut ini:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Pengujian Normalitas**

No	Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	Kepatuhan pada regulasi	0.098	Data Berdistribusi Normal
2	Pemanfaatan teknologi informasi	0.081	Data Berdistribusi Normal
3	Komitmen pimpinan	0.200	Data Berdistribusi Normal

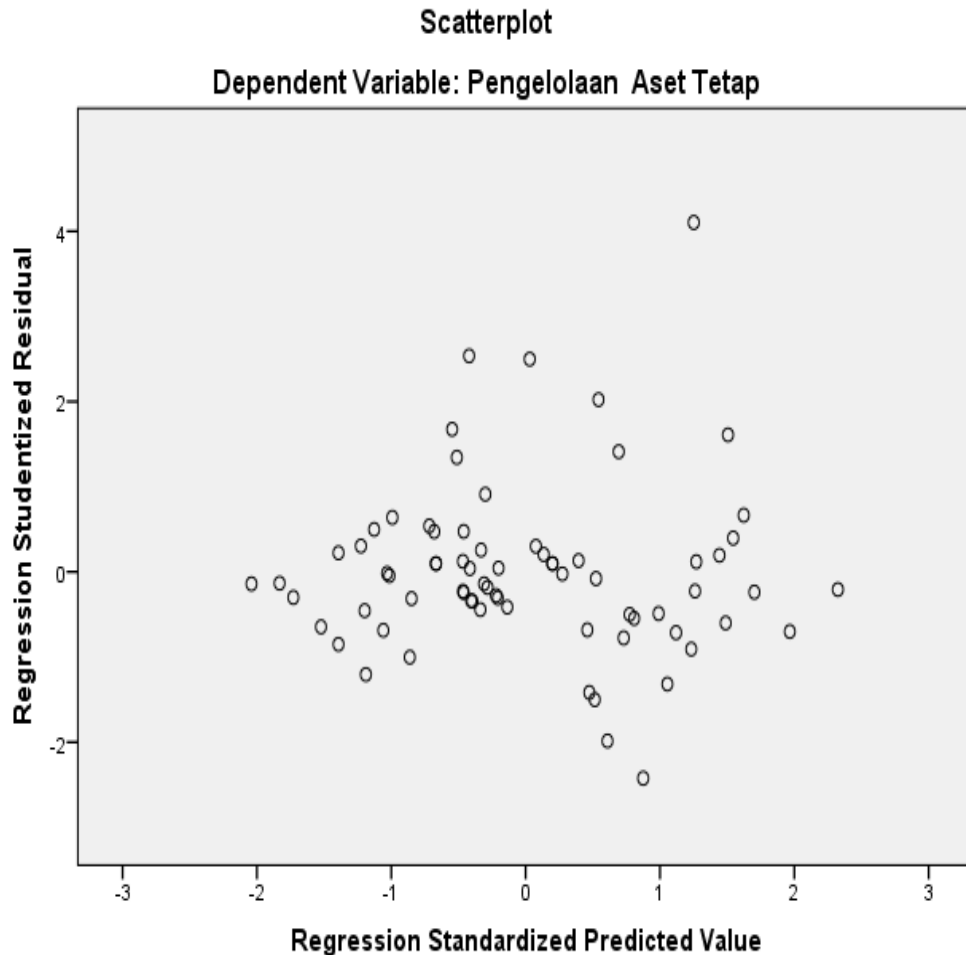
*Sumber: Hasil Analisis Data, Lampiran 5*

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 4.15 diketahui bahwa nilai signifikan untuk semua variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data yang diuji berdistribusi normal.

##### 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data-data yang digunakan dalam analisis regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil analisis uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Uji Heteroskedastisitas**



*Sumber : Hasil Analisis Data , Lampiran 5*

Pada Scatterplot Gambar 4.2 di atas, ditunjukkan bahwa data menyebar merata baik di atas maupun di bawah titik nol. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa data hasil penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain sebaran data adalah sama (homokedastisitas).

### **3. Uji Linearitas**

Hasil analisis uji linearitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Pengujian Linearitas**

No	Variabel	<i>Sig. Linearity</i>	<i>Sig. Deviation from Linearity</i>	Ket
1	Kepatuhan pada regulasi	0.000	0.429	Linear
2	Pemanfaatan teknologi informasi	0.030	0.095	Linear
3	Komitmen pimpinan	0.000	0.311	Linear

*Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 5*

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan dapat dijelaskan oleh regresi linier dengan cukup baik karena nilai *Sig. linearity* data lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, nilai *Sig. Deviation from Linearity* dari tiap variabel adalah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian variabel kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan telah memenuhi syarat linearitas.

#### 4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan adanya hubungan yang erat, kuat antara variabel bebas dan variabel terikat atau tidak. Hasil analisis uji multikolinearitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.17**  
**Hasil Pengujian Multikolinearitas**

No	Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
1	Kepatuhan pada regulasi	0.573	1.746	Tidak Terjadi Multikolinearitas
2	Pemanfaatan teknologi informasi	0.978	1.023	Tidak Terjadi Multikolinearitas
3	Komitmen pimpinan	0.581	1.720	Tidak Terjadi Multikolinearitas

*Sumber : Hasil Analisis Data, Lampiran 5*

Dengan melihat hasil pengujian multikolinearitas Tabel 4.17 diketahui bahwa variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

#### **4.4. Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, baik dengan statistik deskriptif maupun statistik inferensial selanjutnya akan dikaitkan dengan fakta empirik baik fenomena dan data sekunder yang menjadi landasan. Pembahasan hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

##### **4.4.1. Pembahasan Analisis Statistik Deskriptif**

###### **1. Variabel Pengelolaan Aset Tetap**

Dalam penelitian ini, pengelolaan aset tetap adalah proses mengurus dan mengelola semua aset tetap untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dalam melayani masyarakat. Variabel ini diukur dengan 5 (lima) indikator. Adapun jawaban responden terhadap variabel pengelolaan aset tetap bahwa tanggapan responden mengenai pengelolaan aset tetap sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 67,53.

Capaian ini sejalan dengan hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT, yaitu LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 88/LHP/XIX.KUP/04/ 2022 tanggal 26 April 2022 mengungkapkan adanya kelemahan pengelolaan Aset Tetap pada beberapa SKPD belum tertib, antara lain yaitu:

1. Penatausahaan Aset Tetap Tanah belum tertib, terdiri dari: Aset Tetap Tanah tercatat bernilai Rp. 0,00 dan Rp. 1,00, belum bersertifikat, dan bermasalah; sehingga yang secara otomatis aset tanah tersebut tidak dapat dilakukan perhitungan penyusutan.
2. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum tertib, terdiri dari: pengamanan bukti Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi belum seluruhnya dilaksanakan, dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikuasai PNS pensiun/pindah;
3. Penatausahaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum tertib, terdiri dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum dikapitalisasi ke aset induknya; dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum diinventarisasi;
4. Penatausahaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan belum tertib;
5. Penatausahaan Aset Tetap Lainnya belum tertib yaitu tidak diketahui keberadaannya masih dicatat.

Capaian baik pada 3 (tiga) indikator yaitu perencanaan, pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan disebabkan menurut mayoritas responden bahwa dalam menyusun perencanaan kebutuhan aset tetap, telah dilakukan dengan menganalisa kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawai, perencanaan kebutuhan aset tetap juga telah disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Perencanaan pengadaan aset diawali dengan pimpinan perangkat daerah mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam hal pengadaan, proses pengadaan aset tetap memperhatikan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Terkait dengan indikator penggunaan/pemanfaatan, pemanfaatan aset tetap pada tiap OPD digunakan sesuai dengan fungsinya dan tepat guna, serta telah dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset tetap, unit kerja/orang yang menggunakan, lokasi dan informasi terkait lainnya.

Capaian cukup baik pada 2 (dua) indikator yaitu pengamanan dan pemeliharaan serta penghapusan disebabkan menurut mayoritas responden bahwa belum optimalnya pengamanan terhadap aset tetap baik secara administratif, fisik, maupun hukum agar terhindar dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, penyerobotan, dan pengambilalihan atau klaim pihak lain. Selain itu, pemeliharaan aset tetap juga belum dilakukan secara rutin dan secara berkala, sehingga kurang terawatnya aset tetap. Berkaitan dengan penghapusan, menurut responden, organisasi perangkat daerah belum membuat Daftar Usulan Penghapusan aset tetap untuk aset tetap yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang.

## **2. Variabel Kepatuhan Pada Regulasi**

Dalam penelitian ini, kepatuhan pada regulasi adalah tindakan aparatur daerah (pejabat/pegawai) yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap untuk melaksanakan peraturan/regulasi yang berlaku sebagai prosedur pengelolaan aset daerah. Variabel ini diukur dengan 3 (tiga) indikator. Adapun jawaban responden terhadap variabel kepatuhan pada regulasi bahwa tanggapan responden mengenai kepatuhan pada regulasi sebagian besar responden memiliki persepsi dalam

kategori baik dengan nilai rata-rata 71,44. Dari indikator yang diteliti, capaian tertinggi adalah indikator kepatuhan pada standar kerja sebesar 71,81 dan capaian terendah adalah indikator penerimaan akan regulasi sebesar 70,83.

Capaian baik pada indikator penerimaan akan regulasi, kepatuhan pada standar kerja dan kepatuhan administrasi disebabkan menurut mayoritas responden bahwa para pengelola aset mengetahui dan memahami regulasi pengelolaan aset, baik regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta mengetahui tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan aset tetap. Selain itu, menurut mayoritas responden pengelolaan aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, telah dilakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset tetap dilakukan secara rutin, serta dokumen hasil inventarisasi aset tetap, tersedia lengkap.

### **3. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dalam mengolah data aset tetap agar menghasilkan informasi yang berkualitas. Adapun jawaban responden terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 64,26. Dari indikator yang diteliti, capaian tertinggi adalah indikator Perangkat Keras



Komputer (*Hardware*) sebesar 64,72 dan capaian terendah adalah indikator Perangkat Lunak Komputer (*Software*) sebesar 63,75.

Capaian ini sejalan dengan temuan BPK yang menyebutkan bahwa pencatatan dan penyajian Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi NTT menggunakan metode pencatatan manual menggunakan Microsoft Excel (MS Excel) yang dilakukan oleh Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada BPAD. Atas pencatatan dan penyajian Aset Tetap secara manual menyebabkan pencatatan Aset Tetap tidak sesuai standar dan tidak lengkap. Lebih lanjut berdasarkan pemeriksaan fisik dan wawancara diketahui nilai penyusutan setelah kapitalisasi terhadap Aset Tetap yang dilakukan perbaikan belum disesuaikan dengan tambahan masa manfaat.

Capaian cukup baik pada indikator perangkat keras komputer (*hardware*), perangkat lunak komputer (*software*) dan jaringan dan komunikasi disebabkan menurut mayoritas responden bahwa belum tersedianya komputer/laptop yang secara khusus disiapkan untuk pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pengelola sehingga walaupun pelaksanaan tugas terlaksana namun belum diselesaikan tepat waktu, karena terbatasnya sarana kerja tersebut. Selanjutnya, belum optimalnya penggunaan aplikasi untuk menunjang pengelolaan aset tetap, dimana aplikasi ini hanya diperuntukkan pengelola aset di Badan Pendapatan dan Aset Daerah, sedangkan pengelola aset tetap di tiap perangkat daerah belum dapat mengakses aplikasi tersebut. Sedangkan mengenai jaringan dan komunikasi, telah tersedia jaringan internet yang dapat dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan, namun masih terkendala pada sering terjadinya gangguan jaringan.

#### **4. Variabel Komitmen Pimpinan**

Dalam penelitian ini, komitmen pimpinan adalah upaya pimpinan untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan perannya sebagai pimpinan dalam pengelolaan aset tetap. Adapun jawaban responden terhadap variabel komitmen pimpinan menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai komitmen pimpinan sebagian besar responden memiliki persepsi dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 68,19. Dari indikator yang diteliti, capaian tertinggi adalah indikator tanggungjawab sebesar 68,75 dan capaian terendah adalah indikator peran pimpinan sebesar 67,22.

Capaian baik pada indikator sikap pimpinan dan tanggungjawab disebabkan menurut mayoritas responden bahwa pimpinan berupaya untuk secara tegas mengontrol pengelolaan aset tetap, pimpinan juga mengetahui permasalahan yang dihadapi pengurus barang dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap dan berupaya memberikan saran. Selanjutnya, pimpinan sebagai pengguna anggaran, juga menempatkan dirinya sebagai pengguna barang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset tetap, dimana pimpinan selalu memberikan arahan untuk selalu memperhatikan urusan administrasi dan fisik aset tetap yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan pada indikator peran pimpinan, pimpinan masih belum baik dalam hal menetapkan tupoksi dan standar pemeliharaan agar pegawai dapat melakukan pemeliharaan aset tetap sesuai beban dan tanggung jawabnya, dimana pimpinan memberikan arahan untuk membagi tupoksi tapi masih lemah dalam pengawasan pelaksanaan tupoksi tersebut.

#### **4.4.2. Pembahasan Analisis Statistik Inferensial**

##### **1. Pengaruh Kepatuhan Pada Regulasi terhadap Pengelolaan Aset Tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 7.893 (lebih besar dari nilai  $t$  tabel 1,66757) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05, maka keputusannya adalah secara parsial variabel kepatuhan pada regulasi ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengelolaan aset tetap. Artinya, dengan meningkatkan kepatuhan pada regulasi, maka dapat meningkatkan pengelolaan aset tetap.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, didukung dengan hasil penelitian dari Damanik (2019) berjudul “Pengaruh Kepatuhan Pada Regulasi terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Simalungun”, dimana hasil penelitiannya menyatakan kepatuhan pada regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan aset tetap. Pada Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Berbeda dengan hasil penelitian ini, Evlyn (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Kepatuhan Pada Regulasi dan Komitmen Pimpinan Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong” memperoleh hasil bahwa kepatuhan pada regulasi tidak mempengaruhi pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

Berkaitan dengan pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat beberapa aturan atau regulasi antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018. Kepatuhan pada regulasi yang telah baik diharapkan mampu meningkatkan penegelolaan aset tetap. Pihak Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pengelolaan barang milik daerah, misalnya melakukan pendataan aset tetap yang belum memiliki sertifikat, agar kedepannya bisa dilakukan pengurusan administrasi dan memiliki kekuatan hukum.

Regulasi yang berlaku harus mendukung pengelolaan aset tetap yang efektif. Kepatuhan pada regulasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan aset tetap. Tanpa adanya regulasi yang mengatur pengelolaan dan manajemen aset, pemerintah pusat dan daerah akan menghadapi kesulitan dalam mengelola aset. Regulasi adalah jaminan yang harus ada agar pengelolaan aset dilakukan dengan benar, yang secara tidak langsung menjamin bahwa tidak ada penyimpangan atau kecurangan yang terjadi.

## **2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Aset Tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Hasil uji regresi menunjukkan nilai t hitung yang diperoleh sebesar 2.034 (lebih besar dari nilai t tabel 1,66757) dengan nilai signifikansi sebesar 0,046. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka keputusannya adalah secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengelolaan aset tetap. Artinya, dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, maka dapat meningkatkan pengelolaan aset tetap.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, didukung dengan hasil penelitian dari Manullang (2017) “Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara” yang memperoleh hasil pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berbeda dengan hasil penelitian ini, Hendra (2016) melakukan penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Tetap pada SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”, hasilnya pemanfaatan teknologi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengelolaan Aset Tetap SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil uji deskriptif, pemanfaatan teknologi informasi oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT berada pada kondisi cukup baik dan berdasarkan uji regresi, menunjukkan terdapat pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan aset tetap. Dengan demikian, kelemahan teknologi informasi yang saat ini digunakan, perlu menjadi perhatian serius Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT agar lebih ditingkatkan baik dari segi aplikasi, perangkatnya maupun penggunaannya. Hal ini sejalan dengan catatan BPK bahwa pencatatan dan penyajian Aset Tetap secara manual menyebabkan pencatatan Aset Tetap tidak sesuai standar dan tidak lengkap. Selain itu, dengan menggunakan teknologi informasi akan menjadi bentuk respon positif atas catatan BPK yang berharap agar pencatatan dan penyajian Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi NTT tidak lagi menggunakan metode pencatatan manual menggunakan Microsoft Excel (MS Excel). Untuk itu, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) perlu digunakan oleh tiap pengelola aset lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Menurut Yusuf (2010: 189), “agar penarikan informasi menjadi lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diciptakan suatu sistem informasi yang dapat menggantikan pekerjaan manual menjadi pekerjaan yang dikerjakan secara elektronik yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Jika sistem informasi ini digunakan akan memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah termasuk aset tetap secara akurat dan cepat.” Mardiasmo (2017) mengemukakan “pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan manajemen aset tetap daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, serta pengawasan.”

### **3. Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Pengelolaan Aset Tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung yang diperoleh sebesar 2.827 (lebih besar dari nilai  $t$  tabel 1,66757) dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05, maka keputusannya adalah secara parsial variabel komitmen pimpinan ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengelolaan aset tetap. Artinya, dengan meningkatkan komitmen pimpinan, maka dapat meningkatkan pengelolaan aset tetap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Paramitha (2017) berjudul “Pengaruh Kepatuhan pada Regulasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jawa Barat” yang hasilnya adalah komitmen pimpinan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain hasil penelitian yang sejalan, terdapat juga hasil penelitian yang tidak sama dengan hasil penelitian ini. Mansyur (2018) melakukan penelitian ““Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan komitmen pimpinan terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara” yang hasilnya adalah komitmen pimpinan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil uji deskriptif, komitmen pimpinan dalam mengelola aset di lingkup Pemerintah Provinsi NTT berada pada kondisi baik dan berdasarkan uji regresi, menunjukkan terdapat pengaruh dari komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap. Setiap pimpinan perangkat daerah merupakan Pejabat Penatausahaan Barang dan juga Pengguna Barang. Salah satu bentuk tanggung jawab pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang sedang dijalankan saat ini adalah melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya serta menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.

Dalam manajemen, kepemimpinan sangat penting. Memimpin dan dipimpin karena manusia memiliki keterbatasan. Dengan memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa daerah akan menerima tugas dan kewenangan untuk sebagian urusan pemerintahan. Kepemimpinan sangat penting di era otonomi daerah ini,

karena semua aparatur negara harus terbuka, akuntabel, responsif, dan kreatif. Harus diakui bahwa kepemimpinan memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan, termasuk pengelolaan barang milik daerah.

#### **4. Pengaruh Simultan Kepatuhan Pada Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Pimpinan Terhadap Pengelolaan Aset Tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Hasil uji statistik berdasarkan perhitungan Anova menunjukkan nilai F sebesar 61,485 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan atau bersama-sama, variabel kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap.

Nilai koefisien determinasi atau kontribusi variabel kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 73,1%. Menurut Ghozali (2016), nilai *R-Square* dikategorikan kuat jika lebih dari 0,67, moderat jika lebih dari 0,33 tetapi lebih rendah dari 0,67, dan lemah jika lebih dari 0,19 tetapi lebih rendah dari 0,33. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa variabel kepatuhan pada regulasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen pimpinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengelolaan aset tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Irwan (2019) berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Aset Tetap



Pada OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang” yang hasilnya adalah secara simultan, komitmen pimpinan, kepatuhan pada regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pada OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Selain hasil penelitian yang sejalan, terdapat juga hasil penelitian yang tidak sama dengan hasil penelitian ini. Andresia (2019) melakukan penelitian “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Kepatuhan Pada Regulasi Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi” yang hasilnya menyatakan secara parsial, tiap variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan aset tetap, namun secara simultan, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan kepatuhan pada regulasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi.

Menurut Gutomo (2014), “permasalahan aset tetap pemerintah daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah tidak dicatat, barang milik daerah yang tidak ada justru masih dicatat, barang milik daerah dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Hal ini terjadi dikarenakan aset tetap daerah jumlahnya terlalu banyak dalam kuantitas, juga diakibatkan data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya. Selain itu juga, kelemahan dari segi aset tetap ini juga muncul karena pada masa lalu pemerintahan daerah memposisikan pengelolaan barang milik daerah tidak lebih penting dari pengelolaan keuangan dan menumpukan seluruh permasalahan pengelolaan barang kepada pengurus barang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).”

Komitmen pimpinan, kepatuhan pada regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi adalah beberapa faktor yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk memudahkan penatausahaan barang milik daerah secara akurat dan cepat, sistem teknologi informasi manajemen diperlukan.

Menurut Kumorotomo (2012), komitmen pimpinan sangat diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Salah satu masalah kebijakan terkait pengelolaan aset adalah kepala SKPD sering mengambil posisi lebih sebagai pengguna anggaran dan lupa bahwa mereka juga diamanatkan sebagai pengguna atau kuasa pengguna barang yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang di SKPD. Penerapan sistem TI memerlukan komitmen pimpinan untuk menyediakan peralatan dari hardwar. Komitmen pimpinan diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang. Tidak peduli seberapa bagus peraturan, tidak akan berhasil jika pimpinan tidak berkomitmen untuk menerapkannya (Gusman, 2012).